

Community Architecture melalui Comunity Based Development
dalam Pengelolaan Ruang Publik Kampung-Kota
(Studi Kasus: Ruang Publik di Daerah Bantaran Sungai Cihalarang Kelurahan
Sukapada Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung)

Oleh:
Lilis Widaningsih, Tjahyani Busono, dan E. Krisnanto¹

Abstrak

*Tulisan ini disusun berdasarkan hasil penelitian Hibah Bersaing dengan judul **Penerapan Model Desain Ruang Publik di Daerah Bantaran Sungai (dalam Upaya Memperkuat Modal Sosial Masyarakat)** Penelitian ini mengkaji tentang desain ruang publik bagi masyarakat pinggiran kota yang secara fisik keruangan tidak lagi memiliki ruang aktivitas bersama yang memadai. Di tengah-tengah keterbatasan lahan tersebut, perlu kembali digali sejauh mana potensi-potensi fisik dan sosial yang masih dimiliki komunitas masyarakat kampung kota untuk dapat dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan yang partisipatif dalam pengadaan ruang publik.*

*Pendekatan yang digunakan adalah **Participatory Action Research (PAR)** atau **Meneliti dan Membangun Bersama (MMB)**. Dengan mengembangkan paradigma **community architecture** dan **community based development** dalam proses perancangan maupun pembangunan menjadi dasar dalam menggerakkan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat.*

Temuan penelitian merupakan gambaran karakteristik ruang publik kampung serta bagaimana pola penggunaannya oleh masyarakat. Dari temuan tersebut dibuat model pemberdayaan dan kerangka desain yang dapat dikembangkan dalam pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan ruang publik.

Abstact

This paper based on our research on public space design for suburban area – kampung-kota area, that physically has no adequate space for public purposes. In this shortage of space condition, it is necessary to recover physical and social resources and potencies in the community kampung-kota area by partcicipatory approach in acquisition and designing of public space.

*We deploy **Participatory Action Research (PAR)** by developing community architecture paradigm and community based development in design process or development for encouraging community participation.*

¹ Staf Pengajar pada Jurusan Pendidikan Teknik Arsitektur pada Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia (FPTK UPI).

Research found out public space characteristic in kampung-kota area and patterns of public space usage. By these findings we develop empowerment model and design framework for acquisition, developing, utilizing and maintaining kampung-kota public space.

Key terms: public space, community architecture, empowerment, participation.

Pendahuluan

Peran ruang publik bagi masyarakat kampung kota sangat penting, selain menyangkut tata ruang fisik lingkungan, ruang publik juga mengemban fungsi dan makna sosial dan kultural yang sangat tinggi. Namun, pertumbuhan kota yang cepat menyebabkan tuntutan kebutuhan lahan perkotaan makin meningkat. Komersialisasi lahan termasuk di permukiman kampung kota pun tidak dapat dihindari. Privatisasi lahan baik secara individual maupun badan hukum/lembaga telah menyebabkan eksistensi ruang publik makin terpinggirkan. Bahkan di permukiman-permukiman padat penghuni, masyarakat sudah tidak memiliki lagi ruang publik yang memadai untuk mewadahi aktivitas mereka.

Di sisi lain, miskinnya ruang publik yang dapat menampung berbagai aktivitas bersama dikhawatirkan terjadinya berbagai masalah sosial kemasyarakatan sebagai akibat dari kurangnya kebersamaan dan sosialisasi antarwarga. Masyarakat tidak lagi memiliki ruang bersama untuk saling berinteraksi, komunikasi antar warga, anak-anak tidak lagi memiliki tempat bermain di ruang luar, sehingga budaya kebersamaan dan toleransi semakin terkikis.

Untuk itu, tulisan ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang mengkaji tentang desain ruang publik bagi masyarakat pinggiran kota yang secara fisik keruangan tidak memiliki akses dan daya tawar terhadap lahan perkotaan. Temuan penelitian merupakan gambaran karakteristik ruang publik kampung serta bagaimana pola penggunaannya oleh masyarakat. Dari temuan tersebut dibuat model pemberdayaan dan kerangka desain yang dapat dikembangkan dalam pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan ruang publik.

Ruang Publik: Tinjauan Teoritis terhadap Aspek Fisik dan Sosial

Secara sederhana, yang dimaksud ruang publik adalah ruang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum sepanjang waktu, tanpa dipungut bayaran². Lebih lanjut Danisworo mengatakan bahwa ruang publik tidak selalu berupa ruang terbuka hijau, akan tetapi suatu ruang dengan perkerasan seperti jalan raya maupun

² Mohammad Danisworo, "Pemberdayaan Ruang Publik sebagai Tempat Warga Kota Mengekspresikan Diri, Kawasan Gelora Bung Karno". Makalah pada *Seminar dan Lokakarya Pemberdayaan Area Publik di Dalam Kota* yang diselenggarakan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), 2004.

pelataran parkir, dapat menjalankan fungsi publik karena ruang tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum setiap waktu tanpa dipungut bayaran.

Menurut Stephen Carr dkk (1992:19) terdapat 3 (tiga) kualitas utama sebuah ruang publik, yaitu: tanggap (*responsive*), demokratis (*democratic*), dan bermakna (*meaningful*). Yang dimaksud tanggap (*responsive*) berarti bahwa ruang tersebut dirancang dan dikelola dengan mempertimbangkan kepentingan para penggunanya. Sedangkan demokratis (*democratic*) berarti bahwa hak para pengguna ruang publik tersebut terlindungi, pengguna ruang publik bebas berekspresi dalam ruang tersebut, namun tetap memiliki batasan tertentu karena dalam penggunaan ruang bersama perlu ada toleransi diantara para pengguna ruang. Pengertian bermakna (*meaningful*) mencakup adanya ikatan emosional antara ruang tersebut dengan kehidupan para penggunanya.

Desain Ruang Publik Partisipatif

Sejak tahun 1960-an di Amerika dan Eropa telah tumbuh gerakan menentang pendekatan perencanaan dan perancangan teknis-rasional yang dominan pada masa itu, serta juga memperjuangkan terbentuknya praktek profesional baru yang memiliki unsur moral dan politik, berkeadilan sosial, dan memberi kekuasaan pengambilan keputusan pada masyarakat (*citizen empowerment*). Gerakan ini kemudian menghasilkan beberapa paradigma perencanaan dan perancangan partisipatif seperti *Community Architecture* (Christopher dan Rossi, 2003).

Arsitektur merupakan produk budaya yang tidak terlepas dari manusia/masyarakat yang membuat dan menggunakannya. Perancangan arsitektur baik dalam skala bangunan/rumah tinggal maupun skala lingkungan/kawasan kota sudah seharusnya berorientasi pada kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat yang akan menggunakannya. *Community architecture* dalam proses perancangan maupun pembangunan sebuah lingkungan/kawasan kota menjadi dasar dalam menggerakkan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Karena masyarakat dan kehidupannya merupakan realitas sosial yang tidak boleh diabaikan, mereka merupakan potensi sekaligus pengguna setiap karya arsitektur, sehingga antara masyarakat dan rancangan arsitektur seharusnya memiliki kesesuaian.

Community based development mengisyaratkan pentingnya pembangunan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, pola seperti itu memungkinkan partisipasi masyarakat dapat dikembangkan secara optimal. Partisipasi merupakan pemberdayaan (*engagement*) dari kelompok sasaran (*affected group*) dalam satu atau lebih siklus project/program/kegiatan: desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi.

Masyarakat diajak untuk berperan dan didorong untuk berpartisipasi karena masyarakat dianggap: (a) mereka mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan dan kepentingannya/kebutuhan mereka, (b) mereka memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakatnya, (c) mereka mampu

menganalisis sebab akibat dari berbagai kejadian di masyarakat (d) mereka mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, (e) mereka mampu memanfaatkan sumberdaya pembangunan (SDA, SDM, dana, sarana dan teknologi) yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan masyarakatnya yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, (f) anggota masyarakat dengan upaya meningkatkan kemauan dan kemampuan SDM-nya sehingga berlandaskan pada kepercayaan diri dan keswadayaan yang kuat mampu mengurangi dan bahkan menghilangkan sebagian besar ketergantungan terhadap pihak luar.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR) atau Meneliti dan Membangun Bersama (MMB). Teknik utama pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi (observasi data fisik dan observasi terlibat), *focus group discussion* (FGD), dan survei dengan kuesioner tatap muka kepada responden rumah tangga.

Observasi fisik untuk mengidentifikasi karakteristik ruang publik dan penggunaannya oleh masyarakat kampung kota dilakukan di salah satu titik permukiman yang ada di sekitar Sungai Cikapundung dan Sungai Cihalarang Kota Bandung. Sementara sampel lokasi penelitian difokuskan di permukiman Babakan Baru Kelurahan Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.



Gambar 1

Lokasi Penelitian.
Inset adalah photo satelit Kelurahan Sukapada. Garis biru adalah Sungai Cihalarang.

Temuan dan Pembahasan

1. Ruang Publik Kampung Kota

Secara umum, kondisi keterbatasan lahan pada permukiman kampung-kota, telah mendorong masyarakat untuk menyasati pola-pola penggunaan ruang/lahan untuk kegiatan kemasyarakatan mereka. Karakteristik ruang publik pada masing-masing permukiman secara fisik sangat dipengaruhi oleh keterbatasan ruang, tingkat kepadatan penghuni, lingkungan yang tumbuh yang umumnya “*unplanned*”, sosial ekonomi masyarakat, kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan serta faktor lainnya.

a. Jalan Lingkungan sebagai Ruang Publik

Fungsi utama jalan adalah untuk jalur sirkulasi manusia dan kendaraan. Namun tidak demikian halnya jika di suatu *setting* tempat/lingkungan yang memiliki keterbatasan lahan, dengan tingkat kepadatan penduduknya yang tinggi, jalan memiliki multi fungsi. Selain sebagai fungsi sirkulasi, pada permukiman kampung-kota jalan sering digunakan untuk kegiatan sehari-hari masyarakat baik kegiatan individual maupun kegiatan bersama (sosial).



Di dalam ruang yang hanya berdimensi mulai dari 50 cm – 3.00 m tersebut termuat fungsi publik yang beragam, seperti pertukaran ekonomi dengan warung-warung kecil di pinggir gang, komunikasi sosial antar warga kampung, tempat bermain anak-anak dan aktivitas warga lain yang secara terus menerus membentuk satu ikatan emosional antar mereka. Pola hubungan masyarakat seperti itu merupakan “modal sosial” pada komunitas mereka. Tidak heran apabila jalan lingkungan/gang yang berada di permukiman kampung-kota yang padat penghuni, banyak kegiatan yang saling tumpang tindih antara kegiatan *publik* dan kegiatan *privat* masyarakat yang sering dilakukan di jalan.

b. Pemanfaatan Lahan Kosong/Lapangan Terbuka

Di permukiman kampung-kota yang padat penghuni, sudah jarang ditemukan adanya ruang terbuka berupa lapangan atau taman yang representatif untuk menampung kegiatan masyarakat.

Kalaupun masih ada lapangan terbuka yang dapat digunakan masyarakat, dapat dipastikan masa penggunaannya hanyalah sementara sampai batas waktu si pemilik mendirikan bangunan. Beberapa tahun yang lalu di Kelurahan Sukapada misalnya, setiap RW masih memiliki lahan terbuka untuk kegiatan olah raga seperti lapangan *volley ball*, lapangan bulu tangkis bahkan lapangan sepak bola. Selain kegiatan olah raga rutin yang biasanya dilakukan pada sore hari dan malam hari (misalnya untuk bulu tangkis), lapangan terbuka ini berfungsi pula sebagai tempat bermain anak-anak, kegiatan-kegiatan perayaan seperti memperingati hari ulang tahun kemerdekaan, Sholat *Ied* dan lain-lain yang membutuhkan ruang luas. Akan tetapi, sejak tiga tahun terakhir, lapangan olah raga tersebut sudah beralih fungsi menjadi fungsi hunian seiring dengan perpindahan kepemilikan karena lahan tersebut dijual ke pihak lain.



Gambar 3
Lapangan terbuka sebagai ruang publik masyarakat (Lokasi: kelurahan Sukapada kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung
Sumber: Dok. Pribadi

c. Pemanfaatan Daerah Bantaran Sungai

Daerah bantaran sungai merupakan lahan milik negara yang seringkali pemanfaatan dan penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Di Kota Bandung, penggunaan lahan bantaran sungai diatur dalam Perda No. 8 tahun 2002

yang kemudian diubah dengan Perda No 20 tahun 2005, yang mengatur tentang batas kepemilikan negara atau garis sempadan air/sungai sesungguhnya tidak boleh dipergunakan/dimiliki perorangan/lembaga untuk kepentingan individu/ lembaga tersebut. Aturan tersebut



Gambar 4

Rumah-rumah penduduk di bantaran sungai.

Lokasi: Pinqqiran sungai Cikapundung. Sumber: Dokumentasi

menyatakan bahwa besarnya garis sempadan air/sungai (GSA) ditentukan oleh lebar serta debit air sungai. Artinya, tidak seorang pun baik perorangan maupun lembaga/badan hukum diijinkan untuk membuat bangunan pada daerah bantaran sungai.

Dari observasi yang dilakukan di tiga titik permukiman sekitar aliran sungai (Cikapundung dan Cihalarang), hanya sedikit saja daerah bantaran sungai yang masih berfungsi sebagai ruang publik. Dari beberapa daerah bantaran sungai yang masih berfungsi publik, kondisinya pun sangat memprihatinkan karena belum ditata secara



Gambar 5

Pemanfaatan lahan bantaran sungai sebagai ruang bersama dengan kelengkapan fasilitas ruang publik yang disediakan masyarakat.

Lokasi: Kiri: Sungai Ckapundung; Kanan: Kelurahan Sukapada. Sumber: Dokumentasi Pribadi

memadai untuk kepentingan kegiatan masyarakat. Padahal dengan kondisi demikian, lahan bantaran sungai sangat rentan untuk dijadikan tempat tinggal ilegal oleh para pendatang yang tidak memiliki lahan.

Bangunan-bangunan yang berdiri di sekitar bantaran sungai tidak sebatas rumah gubuk, akan tetapi rumah-rumah permanen dengan lahan bersertifikat bahkan bangunan komersil yang berdiri di atas lahan yang luas pun dengan tenang seperti tidak bermasalah. Tentunya banyak persoalan yang tidak sederhana untuk diselesaikan pada saat ini, butuh suatu kebijakan yang komprehensif serta keterlibatan masyarakat luas untuk menyadari begitu pentingnya daerah bantaran sungai untuk kepentingan yang sangat luas dan jangka panjang.

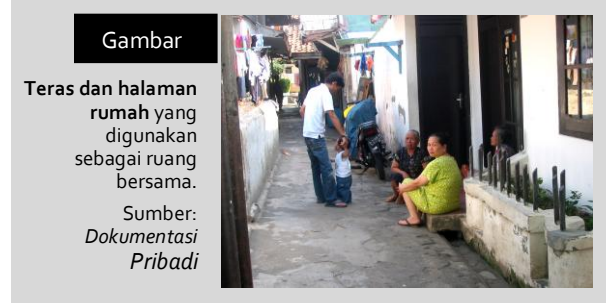
d. Pemanfaatan Halaman Rumah & Ruang-ruang Milik Pribadi

Keterbatasan lahan di permukiman kampung-kota, serta karakteristik masyarakat yang merupakan perpaduan budaya desa dan kota memungkinkan pola hubungan antar warga masih erat. Hal ini menyebabkan warga menyalahi keterbatasan lahan tersebut dengan cara menggunakan ruang-ruang milik pribadi

seperti halaman rumah atau teras untuk kegiatan bersosialisasi. Kebutuhan sosial setiap individu tidak dapat tergantikan oleh apapun, dan manusia butuh manusia lainnya untuk saling mengenal, berbagi atau sekedar *curhat*.

Pemandangan yang sering ditemukan di komunitas permukiman kampung-kota, kaum perempuan (ibu-ibu dan remaja)

memiliki tradisi tersendiri dalam bersosialisasi. Berkumpul untuk sekedar ngobrol di teras rumah setelah selesai mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti menyuci, masak dan beres-beres rumah. Kegiatan ibu-ibu ini biasanya dilakukan pada waktu senggang seperti pagi antara jam 10.00 – jam 12.00 (setelah masak dan menjelang waktu dzuhur dan pulang sekolah anak-anak) atau pada sore hari selepas waktu ashar sampai menjelang magrib. Meskipun kegiatan mereka hanya *ngobrol* atau sambil mengasuh anak, tetapi secara sosial/kultural, kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk “modal sosial” untuk saling mempererat hubungan dan saling menjaga antar sesama warga.



2. Pemberdayaan: Aspek Ekonomi, Lingkungan, Kelembagaan dan Jaringan untuk Pengembangan Ruang Publik

Membangun masyarakat yang berdaya, memiliki kepedulian, mau belajar dan berubah, memahami berbagai perbedaan, memiliki tujuan dan nilai komunitas yang dapat menjadi modal sosial untuk membangun lingkungan yang mereka tinggali merupakan proses panjang yang harus dilakukan. Untuk sebuah tujuan yang sederhana harus dimulai dengan membangun kesadaran individu, serta yang terpenting bagaimana setiap individu masyarakat memahami permasalahan, hak, kewajiban serta tanggung jawab sosialnya dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Pluralitas masyarakat perkotaan di satu sisi, sementara di sisi lain makin menurunnya tradisi kebersamaan, saling mempercayai dan saling berbagi diantara sesama menjadi tantangan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pendekatan konvensional dalam memecahkan berbagai masalah di masyarakat telah terbukti tidak efisien. Kaitannya dengan pembangunan lingkungan fisik sebagai ruang hidup manusia, pola-pola *top down* yang diterapkan selama ini telah menunjukkan bahwa perencanaan kota, penentu kebijakan memperlakukan lingkungan kota hanya sebatas “fenomena fisik” ketimbang “fenomena budaya” (Danisworo, 2007). Masyarakat sebagai pengguna, pelaku dalam sebuah *place* merupakan dimensi yang paling penting dalam proses perancangan. Karena dalam masyarakat lah segala nilai-nilai budaya, pola perilaku, simbol dan karakteristik kehidupan sosialnya yang harus dijadikan dasar dalam merancang sebuah lingkungan/kawasan kota.

Penerapan paradigma *community architecture* dapat diterapkan untuk menjawab kompleksitas kehidupan masyarakat perkotaan serta permasalahan lingkungan fisik. Sementara pemberdayaan masyarakat merupakan proses multi-disiplin, *multi-approach* dan harus simultan. Dimana dalam prosesnya, melibatkan multi-pihak (*multi stakeholder*) karena perubahan merupakan proses pergeseran hubungan antar individu, antar kelompok atau perubahan institusi. Karena itu, pemberdayaan memerlukan intervensi pada sejumlah faktor/elemen penting untuk dapat berlangsung, yang semua elemen ini tidak dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa proses perubahan pada aspek lainnya. Pemberdayaan ini berfokus pada empat aspek: ekonomi, lingkungan, kelembagaan dan jaringan (*networking*).

a. Penguatan Ekonomi Masyarakat

Penguatan ekonomi masyarakat dengan kegiatan unit usaha yang dapat membantu kegiatan perekonomian masyarakat setempat. Ruang usaha yang disediakan baik secara sosial (kebijakan) atau fisik akan mendorong bagi pertumbuhan usaha, yang yang *aplicable* dalam skala kampung.



Gambar 7. Kelompok usaha PKK yang dibentuk sebagai bagian dari pemberdayaan perempuan: Sumber: Dok. Pribadi

Terbuka luasnya akses atau ketersediaan infrastruktur fisik juga memberikan iklim yang lebih baik bagi ekonomi masyarakat. Desain lingkungan yang *aksesible* memungkinkan lalu lintas manusia menjadi lebih tinggi. Dan, desain arsitektur lingkungan semestinya dapat dijadikan salah satu metode intervensi yang dapat memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat.

b. Aspek Lingkungan

Aspek pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan lingkungan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam mendesain lingkungannya (ruang publik) sesuai kebutuhan mereka, melaksanakan pembangunan, menggunakan dan yang terpenting bagaimana memeliharanya agar hasil desain tersebut *sustainable* (berkelanjutan).



Gambar 8

Kegiatan Lingkungan dalam penataan lingkungan sekitar Bantaran Sungai Cihalarang. Pada gambar di atas terlihat para pemuda sedang mempersiapkan tong sampah dan memperbaiki pinggiran sungai. (Lokasi: Permukiman RW 16 dan RW 03 Kelurahan Sukapada. Sumber: Dok. Pribadi)

c. Aspek Penguatan Kelembagaan Lokal dan Pendidikan Masyarakat.

Aspek ini penting dilakukan sebagai upaya penanaman pemahaman bersama atas pentingnya lingkungan yang sehat yang dapat menunjang berbagai kegiatan kemasyarakatan serta bagaimana semua pihak baik secara individual maupun kelembagaan memiliki tanggungjawab bersama terhadap keberlanjutan lingkungannya. Kegiatan dilakukan dengan berbagai pendekatan kepada lembaga-lembaga setempat dan masyarakat melalui diskusi, pertemuan, dan kegiatan bersama lainnya. Menumbuhkan kepercayaan antar warga, kerjasama, partisipasi masyarakat yang terlembaga serta memiliki tujuan komunitas melalui proses pendidikan kemasyarakatan yang berkelanjutan.

d. Aspek Pengembangan Jaringan (networking)

Aspek ini merupakan penguatan jejaring kerjasama dengan lembaga/instansi formal (eksekutif dan legislatif), lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun swasta. Dalam pengembangan jaringan ini memungkinkan masyarakat mendapatkan akses yang lebih luas untuk bekerjasama dalam pembangunan lingkungan fisik dan sosialnya.



Gambar 9

Pertemuan warga dengan aparat dan sebuah LSM

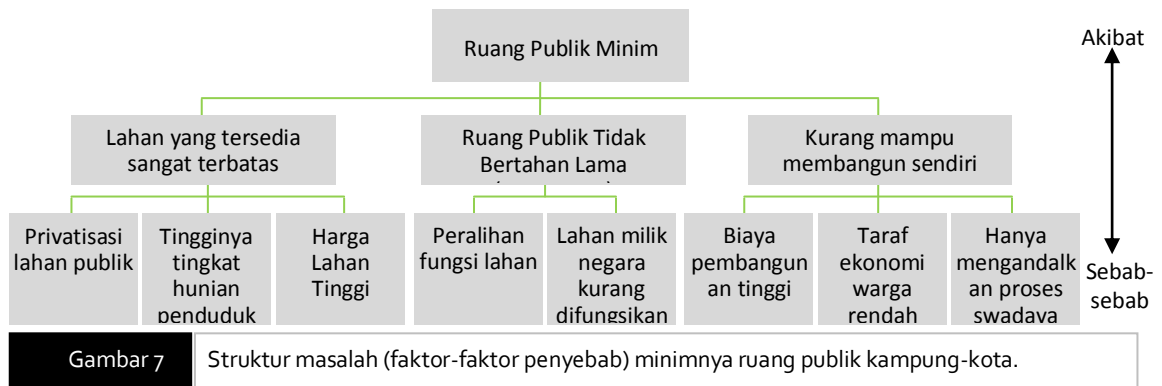
3. Pemberdayaan Ruang Publik dan Penguatan Modal Sosial

Sebagai bagian dari media aktivitas publik, ruang publik menjadi sarana bagi perencanaan pembangunan tingkat warga. Karenanya, perencanaan partisipatif dimulai dari ruang publik.

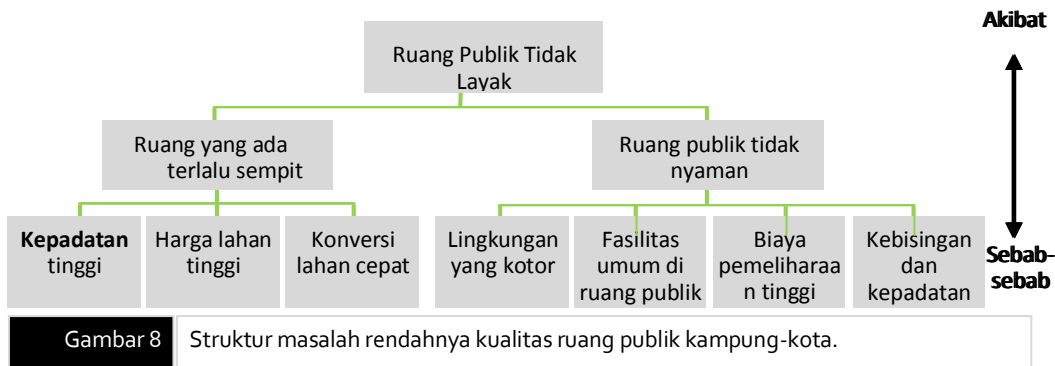
Model pemberdayaan disusun dengan pendekatan *logical framework approach* (LFA), yaitu metode yang menstrukturkan masalah dan kemudian menyusunnya dalam tujuan dan program. Model pemberdayaan disusun sebagai berikut:

a. *Struktur Masalah*

Secara umum terdapat dua masalah ruang publik: minimnya ketersediaan ruang publik dan kelayakannya yang rendah. Seluruh masalah ruang publik di atas dapat disusun dan distrukturkan dalam bagan (pohon) masalah di bawah.



Minimnya ruang publik disebabkan oleh keterbatasan lahan di perkotaan (kampung kota), ruang publik banyak yang hanya bersifat sementara – sebelum dibangun oleh pemiliknya menjadi bangunan pribadi atau komersial, serta kurangnya dana untuk membangun sendiri ruang publik yang dibutuhkan.

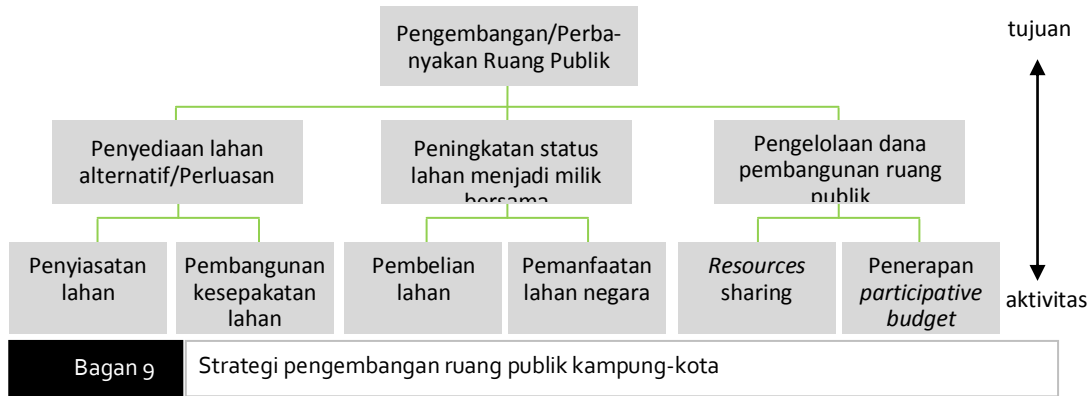


b. *Strategi Pemberdayaan*

Berdasarkan struktur permasalahan di atas, strategi untuk pemberdayaan dapat dikerangkaan seperti bagan di bawah. Dua tujuan utama pemberdayaan ruang publik adalah pengembangan ruang publik serta pemulihan atau perbaikan kualitasnya.

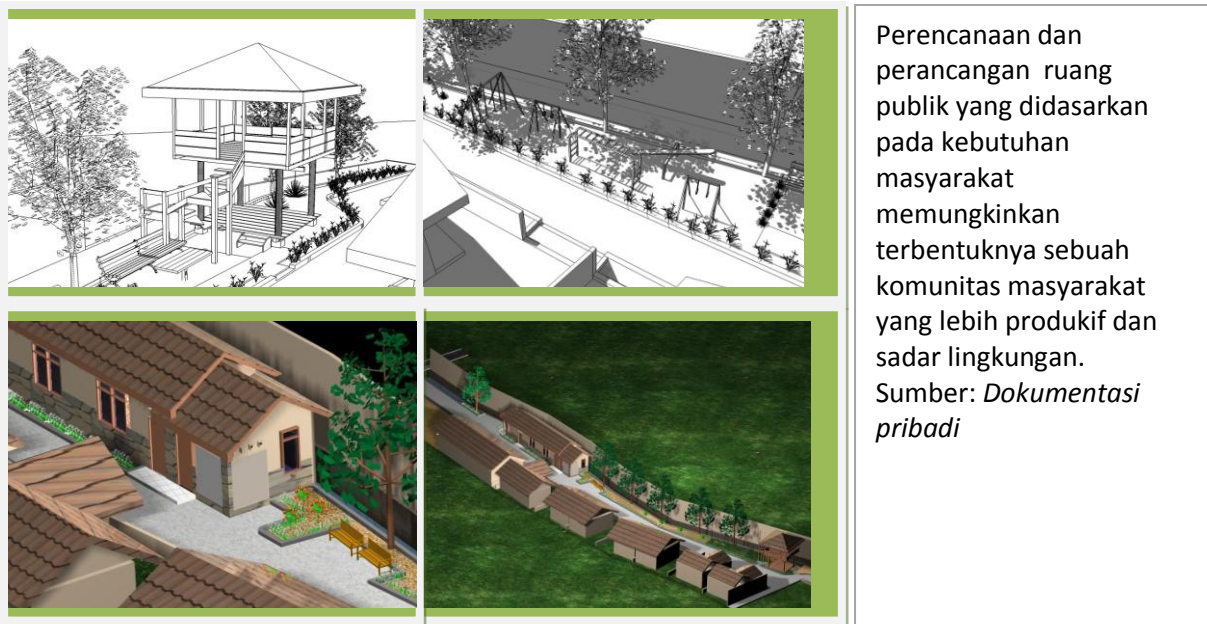
Untuk yang pertama, tujuan utama (*ultimate goal*), strategi (*intermediate goal*) dan output atau aktivitas yang harus dilakukan dapat dilihat dalam bagan di bawah. Pengembangan ruang publik didekati dengan tiga strategi, yaitu: penyediaan lahan alternatif atau perluasan, peningkatan status lahan publik sementara menjadi

milik bersama (komunal), serta perlunya penyediaan dana dengan pengelolaan atau manajemen dana yang dapat digunakan warga untuk menyediakan/membeli sebuah ruang yang dapat dijadikan ruang publik yang lebih permanen.



Sedangkan pemulihan kualitas ruang publik dapat dikembangkan dengan lima strategi yaitu: perluasan area/pengembangan – karena sempitnya lahan membuat ruang publik kurang layak, (2) perbaikan sanitasi lingkungan, (3) penyediaan/perbaikan fasilitas publik seperti toilet, tempat sampah, papan informasi dll, (4) adanya pengelolaan sumber daya finansial/non-finansial secara bersama (*resources sharing*) untuk menjamin pemeliharaan, serta (5) perlunya pengaturan pemeliharaan ruang publik, tetapi ditentukan oleh masyarakat sendiri (*self-regulation*).

Desain Ruang Publik yang Partisipatif





Pembangunan, pemeliharaan daerah bantaran sungai sebagai ruang publik masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri merupakan penguatan modal sosial yang harus ditumbuhkan.
 Sumber: *Dokumentasi pribadi*

Kesimpulan:

Ruang publik di permukiman kampung kota secara fisik sangat dipengaruhi oleh keterbatasan ruang, tingkat kepadatan penghuni, lingkungan yang tumbuh umumnya “*unplanned*”, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terbatas, sumber daya terbatas, serta belum tertatanya lahan yang ada untuk ruang publik. Namun demikian, dengan berbagai cara, masyarakat pada permukiman kampung-kota menyasiasi ruang dan pola penggunaannya sehingga aktivitas bersama masih tetap dapat dilakukan.

Model pemberdayaan yang dapat dikembangkan dalam proses perancangan, pembangunan, penggunaan, dan pemeliharaan ruang publik dengan menggunakan paradigma *community architecture* dan *community based development* dimana masyarakat dilibatkan secara optimal dengan pola partisipatif. Empat aspek pemberdayaan yaitu: *pertama*, penguatan ekonomi masyarakat dengan kegiatan unit usaha yang dapat membantu kegiatan perekonomian masyarakat setempat. *Kedua*, aspek lingkungan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam mendesain lingkungannya (ruang publik) sesuai kebutuhan mereka, melaksanakan pembangunan, menggunakan dan yang terpenting bagaimana memeliharanya agar hasil desain tersebut *sustainable* (berkelanjutan). Aspek *ketiga* adalah penguatan kelembagaan lokal dan pendidikan masyarakat, aspek ini penting dilakukan sebagai upaya penanaman pemahaman bersama atas pentingnya lingkungan yang sehat yang dapat menunjang berbagai kegiatan kemasyarakatan serta bagaimana semua pihak baik secara individual maupun kelembagaan memiliki tanggungjawab bersama terhadap keberlanjutan lingkungannya. Aspek *keempat* adalah pengembangan jaringan (*networking*), aspek ini merupakan penguatan jejaring kerjasama dengan lembaga/instansi formal (eksekutif dan legislatif), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), maupun swasta. Dalam pengembangan jaringan ini memungkinkan

masyarakat mendapatkan akses yang lebih luas untuk bekerjasama dalam pembangunan lingkungan fisik dan sosialnya.

Kerangka desain ruang publik pada lahan bantaran sungai yang dapat dikembangkan di permukiman kampung kota sangat ditentukan oleh karakteristik fisik lingkungan dan karakteristik sosial masyarakatnya. Hasil yang diharapkan: Tertatanya jalan lingkungan di lahan bantaran sungai yang dapat berfungsi sebagai jalur sirkulasi dan ruang publik, tertatanya penghijauan (taman, apotik hidup, dapur hidup) di lahan bantaran sungai dan permukiman sekitarnya, tersedianya ruang publik dengan kelengkapan fasilitas untuk kegiatan masyarakat (tempat duduk, alat-alat bermain anak, lahan parkir, tempat berjualan non permanen dll.), serta tertatanya sistem drainase lingkungan dan sistem pembuangan limbah rumah tangga dengan septiktank komunal.

DAFTAR PUSTAKA

- Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action (ALNAP) (2003), *Participation by Crisis-Affected Populations in Humanitarian Action, A Handbook for Practitioners* (www.alnap.org)
- Adisasmita, Rahardjo (2006), *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan: Konsep dan Model Community Development*. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS), (2006), Laporan *Studi Modal Sosial*.
- Carr, Stephen; Francism Mark; Rivlin, Leane; Stone, Andrew (1992), *Environment and Behavior Series. Public Space*. Cambridge University Press.
- Danisworo, Mohammad (2004), *Pemberdayaan Ruang Publik Sebagai Tempat Warga Kota Mengekspresikan Diri , Kawasan Gelora Bung Karno*. Makalah pada Seminar dan Lokakarya Pemberdayaan Area Publik di Dalam Kota yang diselenggarakan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).
- Day, Christopher (2003), *Consensus Design Socially Inclusive Process*, London: Architectural Press.
- Francis Fukuyama (1995), *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, London: Hamid Hamiltond Ltd.
- Hariyono, Paulus (2007), *Sosiologi Kota untuk Arsitek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Healey, Patsy, *et. al* (ed.) (1995), *The New Urban Context, Managing Cities*. John Wiley & Sons.
- Inoguchi, Takashi; Newman, Edward; Paoletto, Glen (ed.), (2003), *Kota dan Lingkungan: Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi*, Jakarta: LP3ES.
- Khudori, Darwis (20002), *Menuju Kampung Pemerdekaan: Membangun Masyarakat Sipil dari Akar-Akar, Belajar dari Romomangun di Pinggir Kali Code*, Yogyakarta: Yayasan Pondok Rakyat.

- Kompas (2006), *Politik Kota dan Hak Warga Kota*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Laurens, Joyce Marcella (2004), *Arsitektur dan Perilaku Manusia*, Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Putnam, Robert (2000), *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*, New York: Simon and Schuster.
- Setiawan, Mobi B (2004), *Ruang Publik dan Modal Sosial: Privatisasi dan Komodifikasi Ruang di Kampung*. Makalah pada Seminar dan Lokakarya Pemberdayaan Ruang Publik di Dalam Kota, Ikatan Arsitek Indonesia.
- The World Bank (1996), *The World Bank Participation Sourcebook*, Washington DC, see www.worldbank.org
- Wiryomartono, A. Bages P (1995), *Seni Bangunan dan Seni Bina Kota di Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Zahnd, Markus (1999), *Perancangan Kota Terpadu, Teori Perancangan Kota dan Penerapannya*. Yogyakarta: Kanisius.